

Data Test Pemahaman Peserta Didik Tentang Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945

68	60	62	74	68	68	60	72	88	64
76	82	84	78	74	76	70	70	74	80
44	62	66	66	66	72	58	60	80	86
76	74	76	72	74	76	74	64	76	52
68	74	72	68	70	76	54	66	64	70
60	68	70	56	70	72	64	72	68	44
52	58	68	58	46	66	58	68	56	70
78	56	74	76	66	78	68	56	62	72
64	68	58	66	60	70	76	72	68	76
64	66	68	68	60	82	76	70	66	76
60	80	64	62	64	66	74	64	54	62
52	62	66	56	62	68	38	76	42	74
76	66	62	66	54	48	36	44	50	72
66	40	60	38	72	66	58	48	72	68
42	56	52	46	68	66	68	72	70	46
70	70	66	66	66	70	68	64	70	66
60	68	68	64	70	68	84	60	72	68
54	60	70	44	72	68	68	62	68	64

Ditentukan dengan Rumus Sturges¹

I. Distribusi Frekuensi

a. Range (Rentang Data/Jarak)

$$R = ST - SR$$

$$= 88 - 36$$

$$= 52$$

b. Banyak Kelas/ Jumlah Kelas Interval

$$K = 1 + 3,3 \cdot \text{Log } n$$

$$= 1 + 3,3 \cdot \text{Log } 180$$

$$= 1 + 3,3 \cdot 2,26$$

$$= 1 + 7,46$$

$$= 8,46$$

Jadi, jumlah kelas interval 8 atau 9. Pada kesempatan ini digunakan 9 kelas.

¹ Sugiyono. *Statistik untuk Penelitian*. (Bandung: CV. Alfabeta. 2003). h. 27.

c. Panjang Kelas

$$P = \frac{R}{K}$$

$$= \frac{52}{9}$$

$$= 5,78$$

Jadi, panjang kelas 5 atau 6. Pada kesempatan ini digunakan 6 kelas.

d. Ujung Bawah (Skor Terendah)

Nilai	Tabulasi	f	f relatif	f k ats	f k bwh	f r ats	f r bwh
36-41		4	4/180 x 100= 2,22	4	180	2,22	99,99
42-47		9	9/180 x 100= 5	13	176	7,22	94,99
48-53		7	7/180 x 100= 3,89	20	167	11,11	91,10
54-59	 	16	16/180 x 100= 8,89	36	160	20	82,21
60-65	 	32	32/180 x 100= 17,78	68	144	37,78	64,43
66-71	 	62	62/180 x 100= 34,44	130	112	72,22	29,99
72-77	 	38	38/180 x 100= 21,11	168	50	93,33	8,88
78-83		8	8/180 x 100= 4,44	176	12	97,77	4,44
84-89		4	4/180 x 100= 2,22	180	4	99,99	2,22
		Σf =180	Σfr = 100				

II. Tedensi Sentral

Data Jamak

Nilai	f	x	f . x
36-41	4	38,5	154
42-47	9	44,5	400,5
48-53	7	50,5	353,5
54-59	16	56,5	904
60-65	32	62,5	2000
66-71	62	68,5	4247
72-77	38	74,5	2831
78-83	8	80,5	644
84-89	4	86,5	346
	$\Sigma f = 180$		$\Sigma fx = 11880$

Modus
Median kelas

Keterangan :

$$b_1 = 62 - 32$$

$$= 30$$

$$b_2 = 62 - 38$$

$$= 24$$

$$Mo \ b = \frac{65 + 66}{2}$$

$$= 65,5$$

$$Me \ b = \frac{71 + 72}{2}$$

$$= 71,5$$

$$F = 4 + 9 + 7 + 16 + 32$$

$$= 68$$

$$P = 6$$

$$f = 62$$

a. Mean

$$Me = \frac{\Sigma fx}{\Sigma f}$$

$$= \frac{11880}{180}$$

$$= 66$$

b. Modus

$$\mathbf{Mo} = \mathbf{b} + \mathbf{P} \left(\frac{\mathbf{b_1}}{\mathbf{b_1} + \mathbf{b_2}} \right)$$

$$= 65,5 + 6 \left(\frac{30}{30 + 24} \right)$$

$$= 65,5 + 6 \left(\frac{30}{54} \right)$$

$$= 65,5 + 6 \left[0,55 \right]$$

$$= 65,5 + 3,3$$

$$= 68,8$$

c. Median

$$\mathbf{Me} = \mathbf{b} + \mathbf{P} \left(\frac{\frac{1}{2}\mathbf{n} - \mathbf{F}}{\mathbf{f}} \right)$$

$$= 71,5 + 6 \left(\frac{\frac{1}{2} . 180 - 68}{62} \right)$$

$$= 71,5 + 6 \left(\frac{90 - 68}{62} \right)$$

$$= 71,5 + 6 \left(\frac{22}{62} \right)$$

$$= 71,5 + 6 \left[0,35 \right]$$

$$= 71,5 + 2,1$$

$$= 73,6$$

III. Disfersi/Simpangan

Nilai	f	x	x ²	f.x	f.x ²
36-41	4	38,5	1482,25	154	5929
42-47	9	44,5	1980,25	400,5	17822,25
48-53	7	50,5	2550,25	353,5	17851,75
54-59	16	56,5	3192,25	904	51076
60-65	32	62,5	3906,25	2000	125000
66-71	62	68,5	4692,25	4247	290919,5
72-77	38	74,5	5550,25	2831	210909,5
78-83	8	80,5	6480,25	644	51842
84-89	4	86,5	7482,25	346	29929
	Σf= 180			Σfx=11880	Σf x ² =801279

$$\text{Rumus} : S^2 = \frac{n \cdot \Sigma f x^2 - (\Sigma fx)^2}{n \cdot (n - 1)}$$

$$= \frac{180 \cdot 801279 - (11880)^2}{180 \cdot (180 - 1)^2}$$

$$= \frac{144230220 - 141134400}{180 \cdot (179)}$$

$$= \frac{3095820}{32220}$$

$$= 96,08$$

$$S = \sqrt{96,08}$$

$$= 9,80$$

Tabel II

Data Persentase Jawaban Pesertadidik

Nomor Item Soal	Kelas					Jumlah	Jawaban			
	IX IPA 1	XI IPA 2	XI IPS 1	XI IPS 2	XI IPS 3		Benar	%	Salah	%
1.	38	36	33	34	34	175	175	97.22	5	2.778
2.	34	36	28	27	32	157	157	87.22	23	12.78
3.	27	14	10	16	12	79	79	43.89	101	56.11
4.	27	22	24	19	24	116	116	64.44	64	35.56
5.	36	29	31	25	34	155	155	86.11	25	13.89
6.	31	36	34	36	36	173	173	96.11	7	3.889
7.	15	18	12	14	15	74	74	41.11	106	58.89
8.	22	18	11	18	14	83	83	46.11	97	53.89
9.	16	9	16	13	11	65	65	36.11	115	63.89
10.	19	11	23	8	17	78	78	43.33	102	56.67
11.	37	29	27	24	28	145	145	80.56	35	19.44
12.	31	27	29	11	32	130	130	72.22	50	27.78
13.	33	13	31	26	18	121	121	67.22	59	32.78
14.	35	31	33	24	36	159	159	88.33	21	11.67
15.	33	36	23	23	35	150	150	83.33	30	16.67
16.	16	15	8	16	12	67	67	37.22	113	62.78
17.	32	28	38	33	30	161	161	89.44	19	10.56
18.	19	22	22	25	22	110	110	61.11	70	38.89
19.	36	36	34	31	36	173	173	96.11	7	3.889
20.	19	20	19	18	19	95	95	52.78	85	47.22
21.	21	22	21	25	19	108	108	60	72	40
22.	22	19	19	24	11	95	95	52.78	85	47.22
23.	37	33	32	27	36	165	165	91.67	15	8.333
24.	28	31	33	17	20	129	129	71.67	51	28.33

25.	32	31	30	25	34	152	152	84.44	28	15.56
26.	33	17	29	18	30	127	127	70.56	53	29.44
27.	38	34	34	34	34	174	174	96.67	6	3.333
28.	28	13	24	11	12	88	88	48.89	92	51.11
29.	26	14	16	17	31	104	104	57.78	76	42.22
30.	30	25	24	18	22	119	119	66.11	61	33.89
31.	15	15	15	14	21	80	80	44.44	100	55.56
32.	21	22	21	25	19	108	108	60	72	40
33.	23	20	12	18	19	92	92	51.11	88	48.89
34.	23	25	17	22	23	110	110	61.11	70	38.89
35.	22	11	13	10	15	71	71	39.44	109	60.56
36.	37	34	34	28	36	169	169	93.89	11	6.111
37.	19	16	17	12	17	81	81	45	99	55
38.	18	15	14	16	10	73	73	40.56	107	59.44
39.	26	32	24	18	33	133	133	73.89	47	26.11
40.	34	29	33	24	35	155	155	86.11	25	13.89
41.	34	19	15	19	15	102	102	56.67	78	43.33
42.	20	16	12	17	15	80	80	44.44	100	55.56
43.	33	28	32	25	35	153	153	85	27	15
44.	17	14	10	15	20	76	76	42.22	104	57.78
45.	17	22	10	10	17	76	76	42.22	104	57.78
46.	22	20	17	18	14	91	91	50.56	89	49.44
47.	31	36	30	23	35	155	155	86.11	25	13.89
48.	18	19	20	15	12	84	84	46.67	96	53.33
49.	27	22	23	18	20	110	110	61.11	70	38.89
50.	22	17	31	20	15	105	105	58.33	75	41.67

Kisi-kisi instrumen Pemahaman Tentang Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Indikator Sistem Pemerintahan Indonesia (Lembaga Penyelenggaraan Negara)	Indikator Pemahaman				Jml	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
	Membedakan	Menjelaska n	Menyimpulka n	Memberi kan Contoh			
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) - Tugas - Fungsi - Wewenang	1, 8	12	11, 13, 18		6	UUD 1945	§ Test dengan 5 option. § Wawancara § Observasi
2. Presiden dan Wakil Presiden - Tugas - Fungsi - Wewenang	4, 6, 14	15, 16, 17	22, 40	42	9		

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) - Tugas - Fungsi - Wewenang	21, 29	39, 47	49		5		§ Studi Dokumentasi
4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) - Tugas - Fungsi - Wewenang	28, 30	33, 34	38, 41	32	7		
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) - Tugas - Fungsi - Wewenang	2, 19	36, 43	45		5		
6. Mahkamah Agung (MA) - Tugas - Fungsi - Wewenang	3, 5, 7	9, 10, 20	23	27	8		
7. Komisi Yudisial (KY) - Tugas - Fungsi - Wewenang	26	46, 48	50	31	5		

8. Mahkamah Konstitusi (MK) - Tugas - Fungsi - Wewenang	24, 25	35, 37	44		5		
Jumlah	17	17	12	4	50		

DATA INFORMAN

Nama :
 Umur :
 Jenis Kelamin :
 Pekerjaan :
 Pendidikan :
 Hari/Tanggal :
 Alamat :

Daftar Pertanyaan

1. Menurut Ibu, bagaimanakah perkembangan Sistem Pemerintahan Indonesia sekarang ini, khususnya mengenai lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan?
2. Bagaimanakah melatih kepekaan peserta didik terhadap keadaan Sistem Pemerintahan Indonesia saat ini, khususnya mengenai lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan?
3. Dari pengamatan Ibu saat ini, setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mencakup perubahan terhadap lembaga-lembaga ketatanegaraan, apakah masing-masing lembaga tersebut telah melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan konstitusi?
4. Menurut Ibu, apakah lembaga-lembaga negara yang baru terbentuk dari hasil perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah efektif dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya dengan kondisi saat ini?
5. Bagaimanakah mensosialisasikan materi Sistem Pemerintahan Indonesia, khususnya mengenai lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di sekolah?
6. Apakah yang menjadi kendala dalam memberikan materi yang ada kaitannya dengan Sistem Pemerintahan Indonesia, khususnya mengenai lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di sekolah?

Lampiran II

DATA INFORMAN

Nama : Dra. Nanti Triwardhani Utami
 Umur : 42 tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Guru
 Pendidikan : S-1 IKIP JAKARTA
 Hari/Tanggal : Senin/ 24 Maret 2008
 Alamat : Jalan Raya Bogor Komp. Paspampres Kramatjati
 Jakarta Timur.

Daftar Pertanyaan

Pewawancara : Menurut Ibu, bagaimanakah perkembangan Sistem Pemerintahan Indonesia sekarang ini, khususnya mengenai lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan?

Informan : Perkembangan Sistem Pemerintahan Indonesia sekarang ini sudah cukup baik dibandingkan sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, karena dalam menjalankan sistem pemerintahan masing-masing lembaga negara menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya dibatasi oleh undang-undang, sehingga tidak ada kekuasaan yang absolut.

Pewawancara : Bagaimanakah melatih kepekaan peserta didik terhadap keadaan Sistem Pemerintahan Indonesia saat ini, khususnya mengenai lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan?

Informan : Dengan memberikan tugas berupa makalah atau artikel yang membahas mengenai suatu kasus yang sedang terjadi pada saat ini, dengan adanya tugas tersebut dapat mengembangkan daya pikir peserta didik untuk menjadi lebih kritis dalam menanggapi persoalan yang terjadi dalam sistem pemerintahan Indonesia saat ini, khususnya mengenai sistem kelembagaan negara yang telah mengalami empat tahap perubahan.

- Pewawancara : Dari pengamatan Ibu saat ini, setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mencakup perubahan terhadap lembaga-lembaga ketatanegaraan, apakah masing-masing lembaga tersebut telah melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan konstitusi?
- Informan* : Sudah, karena tiap-tiap bab dan pasal di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sekarang ini sudah cukup jelas diterangkan mengenai tugas, fungsi, dan wewenang dari masing-masing lembaga negara, sehingga tidak ada lembaga negara yang keluar dari aturan konstitusi dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan, saat ini tidak ada lembaga tertinggi dan tinggi negara, semua lembaga-lembaga negara kedudukannya sejajar.
- Pewawancara : Menurut Ibu, apakah lembaga-lembaga negara yang baru terbentuk dari hasil perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah efektif dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya dengan kondisi saat ini?
- Informan* : Semua lembaga negara yang baru terbentuk sekarang ini, sangatlah efektif dan sesuai dengan kondisi perkembangan Sistem Pemerintahan Indonesia, karena saat ini rakyat Indonesia sudah mengalami kemajuan dalam pendidikan politik, mereka bisa menilai kinerja lembaga-lembaga negara apabila tidak sesuai dengan konstitusi, mereka bisa langsung menyuarakan aspirasinya.
- Pewawancara : Bagaimanakah mensosialisasikan materi sistem pemerintahan Indonesia, khususnya mengenai lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di sekolah?

Informan : Memberikan penjelasan sesuai dengan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, contohnya saja mengenai materi hubungan dan perjanjian internasional yang saat ini mereka pelajari, di dalam materi itu menjelaskan mengenai tugas pemerintah Indonesia, khususnya Presiden dalam melakukan hubungan dan perjanjian dengan negara lain, dalam melakukan suatu hubungan internasional, maka Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat duta dan konsul, dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR, semua penjelasan tersebut sesuai dengan pasal 13 ayat 1, 2, dan 3. Dengan adanya pengangkatan duta dan konsul serta penerimaan duta negara lain dapat menjalin kerjasama yang baik antar negara dan adanya perlindungan bagi warganegara Indonesia yang sedang berada baik di luar negeri maupun warganegara asing yang sedang berada di Indonesia. Dalam melakukan perjanjian internasional, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, hal ini sesuai dengan pasal 11 ayat 1.

Pewawancara : Apakah yang menjadi kendala dalam memberikan materi yang ada kaitannya dengan Sistem Pemerintahan Indonesia, khususnya mengenai lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di sekolah?

Informan : Kendalanya hanya waktu, karena di sekolah mereka hanya mendapatkan materi hanya 2 jam dalam seminggu, dan tidak semua peserta didik mengikuti kondisi perkembangan saat ini.

DATA EXPERT OPINION

Nama :
 Umur :
 Jenis Kelamin :
 Pekerjaan :
 Pendidikan :
 Hari/Tanggal :
 Alamat :

Daftar Pertanyaan

1. Berdasarkan data-data yang diperoleh di tempat penelitian, didapatkan bahwa masih kurangnya pemahaman pesertadidik tentang Sistem Pemerintahan Indonesia, khususnya mengenai delapan lembaga negara yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Menurut Bapak, mengapa ini dapat terjadi?
2. Sosialisasi seperti apakah agar suatu materi dapat dimengerti oleh pesertadidik?
3. Kegiatan seperti apakah yang efektif dilakukan di sekolah agar dapat merangsang motivasi pesertadidik untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya mengenai struktur kelembagaan negara?
4. Apakah yang mendasari kurangnya pemahaman pesertadidik tentang Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Lampiran III

DATA EXPERT OPINION

Nama : Prof. Ismail Arianto
 Umur : 68 tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Dosen UNJ
 Pendidikan : S-3 UNJ
 Hari/Tanggal : Rabu/ 14 Mei 2008
 Alamat : FIS UNJ

Daftar Pertanyaan

Pewawancara : Berdasarkan data-data yang diperoleh di tempat penelitian, didapatkan bahwa masih kurangnya pemahaman peserta didik tentang Sistem Pemerintahan Indonesia, khususnya mengenai delapan lembaga negara yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Menurut Bapak, mengapa ini dapat terjadi?

Expert Opinion : Jadi masalah PKn ini, *pertama* ialah pada umumnya karena PKn itu tidak termasuk di dalam ujian nasional, sehingga perhatian peserta didik terhadap PKn itu terlalu tinggi, seperti terhadap pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. PKn itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak mengenai langsung dalam kehidupan mereka, karena dalam pikiran mereka antara luar sekolah dengan apa yang diajarkan di sekolah itu sangat jauh atau sangat lebar perbedaannya. Inginnya kita jika diajarkan di sekolah dalam implikasinya harus sama dalam kehidupan di masyarakat. Perhatian yang kurang itu sebenarnya dapat dikembangkan oleh guru di kelas. Di dalam kelas guru harus mempunyai perhatian yang sungguh-sungguh. *Kedua*, sekarang ini guru di kelas itu kebanyakan juga mengajarkannya tidak dengan metodologi yang bervariasi, kebanyakan dengan ceramah paling-paling dengan tanya jawab. Jarang sekali, walaupun

ada itu dengan menggunakan diskusi-diskusi kelompok yang dapat menggerakkan minat peserta didik untuk mempelajari topik-topik atau bahasan-bahasan mengenai PKn itu. Jangan biarkan peserta didik itu belajar seadanya, harus ditingkatkan motivasinya. Ini sebenarnya yang paling penting saya lihat untuk masa depan pelajaran PKn. *Ketiga*, ada kemungkinan buku-buku yang disiapkan kurang dipersir oleh guru untuk dipelajari sebelum memasuki kelas, jadi peserta didik itu kalau sudah masuk kelas, ada guru baru mulai dia ikut memikirkan apa yang akan diajarkan, jadi belajarnya seadanya tidak penuh perhatian sebelumnya, hal-hal seperti itulah yang membuat para peserta didik/pelajar kurang memperhatikan secara sungguh-sungguh. *Keempat*, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu yang sudah diamandemen, banyak perubahan dari yang dahulu ada lembaga baru, ada lembaga-lembaga yang sifatnya tidak mempunyai hubungan antar satu lembaga dengan lembaga lain. Jika tidak dipelajari dengan sungguh-sungguh, maka peserta didik itu kurang memahami betul seperti apa lembaga-lembaga baru itu, sehingga dalam hasil penelitian itu, masih banyak sekali yang kurang nilainya artinya belum mencukupi dan belum ada petunjuk bahwa mereka memahami materi itu dan ini sebenarnya perlu diaktifkan pembelajaran di dalam kelas itu sendiri. Jadi mereka tidak merasakan PKn, yang sebenarnya pelajaran PKn itu penting sekali.

Pewawancara : Sosialisasi seperti apakah agar suatu materi dapat dimengerti oleh peserta didik?

Expert Opinion : Jadi sosialisasi itu ada dua macam, *pertama* sosialisasi lewat pendidikan yaitu yang dilakukan oleh guru di dalam kelas, *kedua*, sosialisasi melalui media massa yaitu melalui televisi, radio, dan koran artinya semua itu dijelaskan secara luas kepada masyarakat dan tentu termasuk didalamnya para

pesertadidik yang suka membaca koran dan melihat televisi dan yang senang mendengarkan berita di radio. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diajarkan di sekolah masih kurang disosialisasikan, hal ini dikarenakan mereka tidak tiap hari mempelajari suatu topik yang berkenaan dengan substansi dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, setiap hari topik bahasannya berubah-ubah, sehingga terlalu sedikit rasanya untuk membicarakan hal-hal yang seharusnya lebih banyak diberikan kepada hal-hal yang penting seperti materi mengenai hubungan antar lembaga negara dan fungsi antar masing-masing lembaga negara.

Pewawancara : Kegiatan seperti apakah yang efektif dilakukan di sekolah agar dapat merangsang motivasi pesertadidik untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya mengenai struktur kelembagaan negara?

Expert Opinion : Jadi menurut Bapa, kegiatan cerdas cermat yang dilakukan di televisi itu sudah bagus, paling tidak dapat merangsang masing-masing sekolah untuk ikut berpartisipasi di dalam upaya memahami berbagai hal yang ada hubungannya dengan PKn terutama Sistem Pemerintahan Indonesia, kegiatan itu dilakukan pada tingkat provinsi dan nasional. Di dalam lingkungan sekolah yang harus dilakukan, *Pertama* adalah

pada saat kegiatan Peringatan 17 Agustus dan Hari Pendidikan Nasional diadakanlah kegiatan cerdas cermat, hal itu dilakukan agar merangsang pesertadidik termotivasi dan akhirnya harus diberikan suatu hadiah, agar dijadikan suatu kebanggaan tersendiri untuk mereka. *Kedua*, secara priodik itu bisa dilakukan melalui kegiatan majalah dinding (Mading), di dalam mading ada bahasan mengenai materi PKn, misalnya mengenai tugas, fungsi, dan wewenang dari masing-masing lembaga negara atau mengenai apa saja yang berhubungan dengan sistem pemerintahan. Pasti akan ada pesertadidik yang tertarik untuk membacanya, apalagi dikemas dalam tulisan yang menarik. Itu sangat manfaat sekali bagi mereka. *Ketiga*, bisa juga dilakukan oleh kepala sekolah, kepala sekolah harus didekati oleh guru-guru PKn, pada saat sambutan upacara seorang kepala sekolah harus bisa membangkitkan motivasi para pesertadidik tentang arti penting sistem ketatanegaraan Indonesia bagi pesertadidik dikemudian hari, karena para pesertadidik dikemudian hari bisa saja menjadi seorang pemimpin negara. Kegiatan seperti itu sangat berguna untuk kepentingan pementapan dan peningkatan kualitas pembelajaran di kelas.

Pewawancara : Apakah yang mendasari kurangnya pemahaman pesertadidik tentang Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Expert Opinion : Jadi sebenarnya sangat bergantung kepada guru, jika guru itu sabar dalam memberikan setiap bahan yang harus dipahami oleh pesertadidiknya, guru itu harus memberikan pemahaman yang betul-betul mantap, artinya jika saya menjelaskan mengenai Presiden, saya harus berupaya mendekatkan fikiran pesertadidik saya itu dengan Presiden yang sedang ada sekarang itu sebagai pemimpin negara.

Jadi bisa diaktualisasikan bahwa presiden kita itu tugasnya adalah ini-ini menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal yang seperti ini dapat mengarahkan pesertadidik kepada hal-hal yang sifatnya lebih konkret, artinya jangan berbicara secara teoretis saja, sehingga tidak dapat menyentuh hati pesertadidik dan kadang pesertadidik tidak mau mendengarkan secara sungguh-sungguh materi yang diterangkan oleh guru, mereka berfikir bahwa ungkapan yang diterangkan oleh guru nanti ada penjelasannya di dalam buku, tinggal dibaca saja . Pengarahan yang lebih konkret ini yang dapat dihayati oleh mereka, sehingga akan ada suatu ungkapan dari pesertadidik “oh, begini rupanya kalau kita suatu saat jadi seorang pemimpin” ungkapan itulah yang menjadi suatu pengetahuan pesertadidik terhadap apa yang diajarkan di kelas. Sebenarnya di dalam buku yang menjadi buku paket itu, banyak sekali hal-hal yang secara *edukatif* dan praktek di dalam berkenegaraan itu bisa dilakukan oleh pesertadidik dan guru pada waktu proses pembelajaran berlangsung.

Wawancara dengan 15 Responden Pesertadidik kelas XI SMA N 93 Jakarta

Daftar Pertanyaan

1. Apakah sekarang ini antara Presiden dan DPR terjalin kerjasama yang baik?
2. Menurut rekan siswa/i apakah lembaga penyelenggara negara saat ini sudah sesuai dengan UUD Tahun 1945 dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, khususnya *eksekutif*, *legislatif*, dan *yudikatif*?
3. Apakah lembaga kehakiman sudah cukup baik dalam mengambil keputusan dan kebijakannya terhadap putusan suatu perkara?
4. Bagaimanakah kinerja lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu MA, MK, dan KY saat ini?
5. Apakah rekan siswa-siswi mengetahui perubahan konstitusi di Indonesia?
6. Bagaimanakah tanggapan dari rekan siswa-siswi dalam mempelajari materi Sistem Pemerintahan Indonesia, khususnya mengenai lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di sekolah?
7. Apakah rekan siswa-siswi mengetahui tugas, fungsi, dan wewenang dari delapan lembaga negara yang ada di Indonesia?
8. Bagaimanakah harapan dari rekan siswa-siswi mengenai kinerja *eksekutif*, *legislatif*, dan *yudikatif* dalam Sistem Pemerintahan Indonesia, khususnya mengenai lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah diamandemen?

Lampiran IV

Wawancara dengan 15 Responden Peserta didik kelas XI SMA N 93 Jakarta

Daftar Pertanyaan

Pewawancara : Apakah sekarang ini antara Presiden dan DPR terjalin kerjasama yang baik?

Responden : Belum terjalin kerjasama yang baik diantara Presiden dan DPR, karena kedua lembaga tersebut memiliki keinginan yang berbeda-beda, tidak ada satu kesepakatan. Presiden maunya maunya begini dan DPR maunya begini, banyak rencana Presiden yang dibantahkan dan ditolak oleh DPR, seperti yang sedang terjadi saat ini di lembaga *legislatif*, yaitu DPR menolak calon gubernur Bank Indonesia yang diajukan oleh Presiden.

Pewawancara : Menurut rekan siswa/i apakah lembaga penyelenggara negara saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, khususnya *eksekutif*, *legislatif*, dan *yudikatif*?

Responden : Sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun belum maksimal masih banyak terdapat kekurangan dan penyimpangan, belum 100% masih ada penyelewengan dan pelaksanaannya ke daerah-daerah pedalaman belum merata.

Pewawancara : Apakah lembaga kehakiman sudah cukup baik dalam mengambil keputusan dan kebijakannya terhadap putusan suatu perkara?

Responden : Masih kurang baik, karena tidak adanya supremasi hukum, dibandingkan dengan negara-negara lain masih sangat kurang, hal ini terlihat dengan adanya penyuapan terhadap jaksa dan

hakim. Mereka belum maksimal dalam menangani suatu perkara, masih kurang transparan.

Pewawancara : Bagiamanakah kinerja lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu MA, MK, dan KY saat ini?

Responden : Dalam konteks tertulis sudah cukup bagus, tapi pelaksanaannya masih kurang efektif. Namun, perlahan tapi pasti akhir-akhir ini ketiga lembaga negara tersebut sudah mulai menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pewawancara : Apakah rekan siswa-siswi mengetahui perubahan konstitusi di Indonesia?

Responden : Mengetahui. Namun, tidak mengkaji lebih dalam sehingga tidak terlalu memahaminya.

Pewawancara : Bagiamanakah tanggapan dari rekan siswa/i dalam mempelajari materi Sistem Pemerintahan Indonesia, khususnya mengenai lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di sekolah?

Responden : Bertambah luas, sehingga kami mengetahui teori yang diberikan oleh guru. Lalu kami melihat aplikasinya di media pembelajaran yang lain seperti koran, buku-buku referensi di perpustakaan, dan televisi. Dengan adanya pemberitaan mengenai kinerja dari masing-masing lembaga negara, maka kami bisa mengetahui informasi yang dapat melengkapi penjelasan yang kami lihat.

Pewawancara : Apakah rekan siswa-siswi mengetahui tugas, fungsi dan wewenang dari delapan lembaga negara yang ada di Indonesia?

Responden : Cukup tahu, tidak seluruhnya hanya sebagian.

1. MPR : Memiliki wewenang untuk melantik dan memberhentikan Presiden dan Wapres, menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar.
2. Presiden : Sebagai kepala negara/kepala pemerintahan yang menjalankan Sistem Pemerintahan Indonesia dan dibantu oleh para menteri negara.
3. DPD : Mengurusi masalah otonomi daerah dan masalah daerah yang ingin melakukan perluasan daerah/ pemekaran daerah.
4. DPR : Membuat rancangan undang-undang bersama Presiden sebagai lembaga *eksekutif*.
5. BPK : Mengurusi keuangan negara.
6. MA : Mengadili pada tingkat kasasi dan sebagi lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.
7. MK : Lembaga negara yang memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu, contohnya beberapa kasus pilkada di daerah, seperti kasus hasil pilkada Depok.
8. KY : Tidak begitu memahami.

Pewawancara : Bagaiamanakah harapan dari rekan siswa-siswi mengenai kinerja *eksekutif*, *legislatif*, dan *yudikatif* dalam Sistem Pemerintahan Indonesia, khususnya mengenai lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah diamandemen?

Responden : Semoga lebih baik lagi dan diharapkan dapat berjalan lancar sesuai dengan konstitusi, serta tidak ada lagi penyimpangan.

1. Lembaga *legislatif* : Tidak mementingkan pribadinya masing-masing. Dapat menjalin komunikasi yang baik dengan lembaga *eksekutif*
2. Lembaga *eksekutif*: Lebih memperhatikan rakyat, sehingga terjalin hubungan yang baik dan kesejahteraan rakyat terjamin. Dalam membuat suatu kebijakan harus melihat dengan kondisi rakyat, mereka harus melihat darimana mereka berasal dan harus melihat proses, karena mereka dipilih oleh rakyat.
3. Lembaga *yudikatif*: Harus ada supremasi hukum dan transparansi di bidang hukum, sehingga tidak ada lagi kasus penyuapan dalam memutuskan perkara, karena saat ini orang jujur sedikit. Diharapkan tidak ada lagi tindakan korupsi dan tidak mementingkan penguasa dan pengusaha.

Wawancara dengan 15 Responden Pesertadidik kelas XI SMA N 93 Jakarta

DATA RESPONDEN

1. Nama : Willys Widiawati
 Umur : 17 tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kelas : XI IPA 1
 Hari/Tanggal : Rabu/ 12 Maret 2008
 Alamat : Jalan Raya Bogor Komp. Paspampres Kramatjati Jakarta Timur.

2. Nama : Arfiyah trisulawati
 Umur : 16 tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kelas : XI IPA 1
 Hari/Tanggal : Rabu/ 12 Maret 2008
 Alamat : Jalan Raya Bogor Komp. Paspampres Kramatjati Jakarta Timur.

3. Nama : Achmad Fadhly Surya Negara
 Umur : 15 tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kelas : XI IPS 2
 Hari/Tanggal : Rabu/ 12 Maret 2008
 Alamat : Jalan Raya Bogor Komp. Paspampres Kramatjati Jakarta Timur.

4. Nama : Fendy Febrianda
 Umur : 17 tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kelas : XI IPS 2
 Hari/Tanggal : Rabu/ 12 Maret 2008
 Alamat : Jalan Raya Bogor Komp. Paspampres Kramatjati Jakarta Timur.

5. Nama : Muhammad Iqbal Fajri
 Umur : 16 tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kelas : XI IPA 1
 Hari/Tanggal : Rabu/ 12 Maret 2008
 Alamat : Jalan Raya Bogor Komp. Paspampres Kramatjati Jakarta Timur.

6. Nama : Dwi Putri Susanti
 Umur : 16 tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan

- | | |
|--------------|--|
| Kelas | : XI IPA 1 |
| Hari/Tanggal | : Rabu/ 12 Maret 2008 |
| Alamat | : Jalan Raya Bogor Komp. Paspampres Kramatjati
Jakarta Timur. |
7. Nama : Rhiny Verayanti
- | | |
|---------------|--|
| Umur | : 16 tahun |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Kelas | : XI IPA 1 |
| Hari/Tanggal | : Rabu/ 12 Maret 2008 |
| Alamat | : Jalan Raya Bogor Komp. Paspampres Kramatjati
Jakarta Timur. |
8. Nama : Ika Yuliyanti
- | | |
|---------------|--|
| Umur | : 16 tahun |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Kelas | : XI IPA 1 |
| Hari/Tanggal | : Rabu/ 12 Maret 2008 |
| Alamat | : Jalan Raya Bogor Komp. Paspampres Kramatjati
Jakarta Timur. |
9. Nama : Nurhayati
- | | |
|---------------|--|
| Umur | : 16 tahun |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Kelas | : XI IPA 2 |
| Hari/Tanggal | : Rabu/ 12 Maret 2008 |
| Alamat | : Jalan Raya Bogor Komp. Paspampres Kramatjati
Jakarta Timur. |
10. Nama : Riska Putri Fitriani
- | | |
|---------------|--|
| Umur | : 16 tahun |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Kelas | : XI IPA 2 |
| Hari/Tanggal | : Rabu/ 12 Maret 2008 |
| Alamat | : Jalan Raya Bogor Komp. Paspampres Kramatjati
Jakarta Timur. |
11. Nama : Syifa Fauziah
- | | |
|---------------|--|
| Umur | : 16 tahun |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Kelas | : XI IPS 2 |
| Hari/Tanggal | : Kamis/ 13 Maret 2008 |
| Alamat | : Jalan Raya Bogor Komp. Paspampres Kramatjati
Jakarta Timur. |
12. Nama : Tri Utami
- | | |
|---------------|-------------|
| Umur | : 17 tahun |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |

- | | |
|--------------|--|
| Kelas | : XI IPS 1 |
| Hari/Tanggal | : Kamis/ 13 Maret 2008 |
| Alamat | : Jalan Raya Bogor Komp. Paspampres Kramatjati
Jakarta Timur. |
13. Nama : Ahmad Fauzi
Umur : 16 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kelas : XI IPS 1
Hari/Tanggal : Kamis/ 13 Maret 2008
Alamat : Jalan Raya Bogor Komp. Paspampres Kramatjati
Jakarta Timur.
14. Nama : Nabilla Astri
Umur : 16 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kelas : XI IPS 3
Hari/Tanggal : Kamis/ 13 Maret 2008
Alamat : Jalan Raya Bogor Komp. Paspampres Kramatjati
Jakarta Timur.
15. Nama : Eben Heazer
Umur : 16 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kelas : XI IPS 3
Hari/Tanggal : Kamis/ 13 Maret 2008
Alamat : Jalan Raya Bogor Komp. Paspampres Kramatjati
Jakarta Timur.

TEST PENELITIAN

Kepada Yth,
Rekan siswa-siswi
SMA Negeri 93 Jakarta
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera kepada rekan-rekan, semoga kiranya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sehubungan dengan penulisan skripsi yang sedang saya lakukan dan guna menyelesaikan studi saya di Universitas Negeri Jakarta, maka saya mohon bantuan rekan siswa-siswi SMA Negeri 93 Jakarta untuk menjawab test pengukuran yang telah terlampir. Adapun skripsi saya berjudul “Pemahaman Pesertadidik Tentang Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Studi Deskriptif Pesertadidik Kelas XI SMA Negeri 93 Jakarta Timur)”.

Test Pengukuran ini tidak akan berpengaruh apapun terhadap nilai siswa-siswi SMA Negeri 93 Jakarta, namun saya sangat mengharapkan kesediaan rekan siswa-siswi SMA Negeri 93 Jakarta dalam mengisi test pengukuran ini, sesuai dengan petunjuk.

Semoga budi baik rekan siswa-siswi SMA Negeri 93 Jakarta mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Hormat saya,

Eka Sartika

Nama :
 Umur :
 Kelas :
 Jenis Kelamin : laki-laki/ perempuan
 Tanggal :

Lampiran V

Test : Pemahaman Peserta Didik Tentang Sistem Pemerintahan Indonesia
 Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Petunjuk Pengisian Test: Berilah tanda silang (x) pada salah jawaban yang dianggap paling benar!

1. Wewenang MPR adalah melantik dan memberhentikan:....
 - a. Presiden dan Wakil Presiden
 - b. Anggota DPD
 - c. Anggota MA
 - d. Anggota BPK
 - e. Anggota DPR
2. Lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melaporkan hasil pemeriksaan pelaksanaan APBN kepada DPR adalah:....
 - a. DPD
 - b. MA
 - c. BPK
 - d. KY
 - e. MK
3. Lembaga negara RI yang melaksanakan kekuasaan yudikatif adalah:....
 - a. MA
 - b. DPR
 - c. DPD
 - d. Presiden
 - e. BPK
4. Lembaga negara yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD adalah:....
 - a. BPK
 - b. Presiden
 - c. MK
 - d. DPR
 - e. DPD
5. Badan peradilan tertinggi di Indonesia adalah:....
 - a. Pengadilan Tinggi
 - b. DPR
 - c. Pengadilan Negeri
 - d. BPK
 - e. MA
6. Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh:....
 - a. DPD
 - b. MPR
 - c. DPR
 - d. Rakyat
 - e. Partai Politik
7. Salah satu lembaga negara yang memiliki fungsi menjadi pimpinan bagi pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya adalah:....
 - a. KY
 - b. Pengadilan Tinggi
 - c. MA
 - d. MK
 - e. Pengadilan Negeri

8. Segala keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan berdasarkan:....
a. Absensi b. Putusan c. Perjanjian d. Kesepakatan e. Suara terbanyak
9. Lembaga negara yang berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang adalah:....
a. BPK b. Presiden c. DPR d. MA e. DPD
10. Lembaga negara yang memiliki hak untuk menerima kasasi adalah:....
a. MPR b. MA c. BPK d. DPD e. DPR
11. Lembaga negara yang berwenang untuk menetapkan UUD adalah:....
a. DPD b. BPK c. MA d. MK e. MPR
12. Keanggotaan MPR terdiri dari:....
a. Anggota MK dan MA d. Anggota DPR dan DPD
b. Anggota MK dan BPK e. Anggota DPR dan KY
c. Anggota DPD dan MA
13. Lembaga negara yang menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden adalah:....
a. MA b. KY c. BPK d. MK e. MPR
14. Tugas dewan pertimbangan yang dibentuk oleh Presiden adalah:....
a. Mengangkat dan menerima duta
b. Memberi gelar dan tanda jasa
c. Memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden
d. Memberikan usulan terhadap sistem pemerintahan
e. Memberikan penjelasan terhadap putusan DPR
15. Dalam Sistem Presidensial maka Presiden dibantu oleh:....
a. DPD b. DPR c. MA d. Menteri Negara e. KY
16. Pemberian Amnesti dan Abolisi diberikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan:....
a. MA b. DPD c. KY d. DPR e. MK
17. Jika Presiden berhenti dalam masa jabatannya, maka yang menggantikan kewajiban dalam menjalankan sistem pemerintahan sampai akhir masa jabatannya habis adalah:....
a. DPR b. Menteri Negara c. DPD d. MK e. Wakil Presiden

18. Lembaga negara yang berwenang untuk mengadakan perubahan terhadap UUD 1945 adalah:....
a. MK b. DPR c. MA d. MPR e. KY
19. Lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah:....
a. MPR b. BPK c. MK d. MA e. DPR
20. Pemberian Grasi dan Rehabilitasi diberikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan:....
a. MA b. KY c. DPR d. DPD e. MK
21. Menurut pasal 22 C ayat 1, anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih melalui:....
a. Absensi b. Pemilu c. Suara terbanyak d. Perjanjian e. Kesepakatan
22. Dalam pasal 13 ayat 1, Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat:....
a. Dirjen d. Staf Ahli
b. Duta dan Konsul e. Atase
c. Dewan Pertimbangan
23. Lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan adalah:....
a. BPK b. Presiden c. DPR d. MA e. DPD
24. Lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD adalah:....
a. DPR b. DPD c. BPK d. MPR e. MK
25. Lembaga negara yang baru terbentuk setelah adanya perubahan UUD 1945 yang memiliki kekuasaan di bidang kehakiman adalah:....
a. Presiden b. DPD c. MK d. DPR e. BPK
26. Lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR adalah:....
a. BPK b. KY c. DPR d. DPD e. Presiden
27. Lembaga negara yang keanggotaannya terdiri dari hakim agung adalah:....
a. BPK b. DPR c. DPD d. Presiden e. MA

28. Hak DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden mengenai kebijakan pemerintahan disebut:....
a. Angket b. Budget c. Interpelasi d. Imunitas e. Protokoler
29. Menurut pasal 22 C ayat 2, anggota Dewan Pemerintahan Daerah dipilih dari setiap:....
a. Provinsi b. Kabupaten c. Kotamadya d. Kecamatan e. Kelurahan
30. Lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk UU adalah:....
a. KY b. MA c. BPK d. MK e. DPR
31. Lembaga negara yang di bentuk melalui amandemen ketiga UUD 1945 yang memiliki sifat mandiri adalah:....
a. MA b. BPK c. MPR d. DPD e. KY
32. Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui:....
a. Pemilu b. Putusan c. Suara terbanyak d. Perjanjian e. Kesepakatan
33. Lembaga negara yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan adalah:....
a. KY b. DPR c. DPD d. MPR e. MK
34. Pemegang kekuasaan legislatif di Indonesia adalah:....
a. MK b. Presiden c. DPR d. DPD e. MA
35. Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah:....
a. DPR b. BPK c. DPD d. MK e. Presiden
36. Lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk melaporkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPRD, dan DPD adalah:....
a. DPD b. Presiden c. MK d. DPR e. BPK
37. Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memutuskan pembubaran partai politik di Indonesia adalah:....
a. Presiden b. MK c. BPK d. DPD e. DPR
38. Hak DPR untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijakan Presiden, disebut:....
a. Interplasi b. Budget c. Angket d. Petisi e. Inisiatif

39. Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan suatu pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah adalah:....
- a. MA b. BPK c. MPR d. DPD e. KY
40. Pemegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara adalah:....
- a. Ketua KY b. Presiden c. Ketua DPR d. Ketua MK e. Ketua MA
41. DPR memiliki hak budget yaitu:....
- a. Hak untuk mengusulkan RUU
b. Hak untuk meminta keterangan
c. Hak untuk mengadakan suatu penyelidikan
d. Hak untuk mengajukan RAPBN
e. Hak menyampaikan pendapat
42. Hak Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, baik yang memimpin departemen maupun nondepartemen disebut:....
- a. Hak Imunitas d. Hak Angket
b. Hak Interplasi e. Hak Budget
c. Hak Prerogatif
43. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di:....
- a. Ibu kota negara b. Provinsi c. Kotamadya d. Kabupaten e. Kecamatan
44. Lembaga negara yang memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/Wapres menurut UUD adalah:....
- a. MA b. MK c. DPD d. BPK e. KY
45. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh:....
- a. DPR dengan pertimbangan DPD
b. Presiden dengan pertimbangan MA
c. MA dengan pertimbangan KY
d. MPR dengan pertimbangan DPR
e. DPD dengan pertimbangan MK

46. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh:....
- a. Presiden dengan persetujuan DPR
 - b. Presiden dengan persetujuan MK
 - c. Presiden dengan persetujuan DPD
 - d. Presiden dengan persetujuan KY
 - e. Presiden dengan persetujuan BPK
47. Bila suatu provinsi ingin melakukan otonomi daerah dan mengadakan pemekaran terhadap daerahnya, maka kewenangannya berada di bawah lembaga:....
- a. MA b. Presiden c. MPR d. BPK e. DPD
48. Komisi Yudisial menurut pasal 24B ayat 1 bersifat:....
- a. Bijaksana b. Mandiri c. Adil d. Tetap e. Konsisten
49. Lembaga negara yang memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan masalah pajak, pendidikan, dan agama di setiap daerah adalah:....
- a. DPR b. BPK c. DPD d. MK e. Presiden
50. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan:....
- a. UU b. PP c. Perpres d. Keppres e. Perda

Lampiran VI

KUNCI JAWABAN

- | | |
|-------|-------|
| 1. A | 26. B |
| 2. C | 27. E |
| 3. A | 28. C |
| 4. B | 29. A |
| 5. E | 30. E |
| 6. D | 31. E |
| 7. C | 32. A |
| 8. E | 33. B |
| 9. D | 34. C |
| 10. B | 35. D |
| 11. E | 36. E |
| 12. D | 37. B |
| 13. E | 38. C |
| 14. C | 39. D |
| 15. D | 40. B |
| 16. D | 41. D |
| 17. E | 42. C |
| 18. D | 43. A |
| 19. B | 44. B |
| 20. A | 45. A |
| 21. B | 46. A |
| 22. B | 47. E |
| 23. D | 48. B |
| 24. E | 49. C |
| 25. C | 50. A |

Lampiran VII

Daftar Pesertadidik yang mengikuti Test**Kelas : XI IPA 1**

No.	Nama Pesertadidik	Nilai
1.	Abdul Rohim	68
2.	Agustina Ekamawar Ningrum	60
3.	Ahmad Syafi'i	62
4.	Aidiyah Novian Nisyah	74
5.	Andi Septian Wiranata	68
6.	Arfiyah Trisulawati	68
7.	Bayu Hendra Oktavianto	60
8.	Diky Puji Kurniawan	72
9.	Dina Erwanti	88
10.	Dwi Nuryani	64
11.	Dwi Putri Susanti	76
12.	Dwi Wijanarko	82
13.	Eko Prastyanto	84
14.	Evanty Andriani Agnes	78
15.	Febriansyah Utama Putra	74
16.	Fenny Maulidiah Septiawati	76
17.	Firdaus	70
18.	Hellen Puspita Dewi	70
19.	Ika Yuliyanti	74
20.	Irfan Kustoyo	80
21.	Ita Juwita	44
22.	Jevika Dian Sagita Buana	62
23.	Kristin Rosaline Caser	66
24.	Moh Fajri	66
25.	Muhammad Faisal Akbar	66
26.	Muhammad Iqbal Fajri	72
27.	Muhammad Pra Yudha	58
28.	Nezatullah Ramadhan	60
29.	Nurzarawati	80
30.	Paksi Widhyan Prakoso	86
31.	Prayudha Dharma	76
32.	Putri Oktariani	74
33.	Rhiny Verayanti	76
34.	Rosi Puspaningsih	72
35.	Vicavara Chusnul Chotimah	74
36.	Willys Widiawati	76
37.	Wiwin Ria Agustina	74
38.	Yeyen BR. Simbolon	64
Rata-rata nilai		70.89

Kelas : XI IPA 2

No.	Nama Pesertadidik	Nilai
1.	Abdul Rahman	76
2.	Angga Wibowo Pratomo	52
3.	Anggun Valensia Manja	68
4.	Arinie Putriana Sukmawar	74
5.	Brain Hara Raja Togas	72
6.	Cahyo Tri Utamo	68
7.	Cesariando	70
8.	Clarissa Yanmari	76
9.	Dani Ramadani	54
10.	David Parulian	66
11.	Devista Kusuma Dewi	64
12.	Dewi Marlina	70
13.	Dimar Nofianto	60
14.	Dini Nur Fajriah	68
15.	Eka purwati	70
16.	Elvinsyah Armana Taufik	56
17.	Erni Ambarwati	70
18.	Fitria Wulandari	72
19.	Hanunah Sofa	64
20.	Hendra Pratama	72
21.	Isti Farani Mahardika	68
22.	Janfer Bornok Parulian	44
23.	Junita Mugi Fadzila	52
24.	Magdalena Dea Resnawati	58
25.	Manggala	68
26.	Muararif Fahrezi	58
27.	Muhammad Fawzi Nurhakim	46
28.	Niken Tifani Saputri	66
29.	Novita Suryani	58
30.	Nurfitria Permatasari	68
31.	Nurhayati	56
32.	Oktaviabita Inawati	70
33.	Riska Putri Fitriani	78
34.	Ryan Arya Pradhana	56
35.	Wawan Aidil Mubaraq	74
36.	Widya Rizki Anggraeni	76
Rata-rata nilai		64.94

Kelas : XI IPS 1

No.	Nama Pesertadidik	Nilai
1.	Ahmad Fauzi	66
2.	Ahmad Nur Kholosh	78
3.	Angga Bimantoro	68
4.	Angga Surya Kusuma	56
5.	Anggita Putri Utami	62
6.	Annisa Fitriana Ariestari	72
7.	Arga Raditya Pratama	64
8.	Fanny Eka Saputra	68
9.	Fika Amalia	58
10.	Hadi Supriyanto	66
11.	Ismail Windy Utama	60
12.	Miea Anggreani	70
13.	Mutia Zahroni	76
14.	Nanda wahyu purnomo	72
15.	Nur Yuliana	68
16.	Reski Dwi Romadon	76
17.	Resti Afrianingrum	64
18.	Rika Oktaviany	66
19.	Rika Rahmawati	68
20.	Rinda	68
21.	Riyung rosyaputri	60
22.	Rizki Amelia	82
23.	Roy Franki	76
24.	Saefulloh Hidayat	70
25.	Tri Ayu Wardhina	66
26.	Tri Utami	76
27.	Tri Wahyu Rezeki	60
28.	Tri Wulan Puguh Santoso	80
29.	Unia	64
30.	Vivi Octaviani	62
31.	Winda Juniati	64
32.	Wiwi Wirawati	66
33.	Yuli Widiastuti	74
34.	Yunita Wardani	64
Rata-rata nilai		67.94

Kelas : XI IPS 2

No.	Nama Pesertadidik	Nilai
1.	Aldin Gustafino	54
2.	Amira	62
3.	Arian Rama Diba	52
4.	Carloanzah Libriano	62
5.	Citra Nur Kumalasari	66
6.	Dessy Noptianti	56
7.	Dewi Septiyanti Utami	62
8.	Dian Aryanti	68
9.	Ditto Agung Galih Prakoso	38
10.	Elly Mangesti Maharani	76
11.	Emiliyus Meinrat Purba	42
12.	Ervi Julia nurazizah	74
13.	Fanny Vera Veriani	76
14.	Fendy Febrianda	66
15.	Getar Jabbar	62
16.	Golkas	66
17.	I Gusti Ayu Anggi W. P	54
18.	Irawan Margynata	48
19.	Lamsar Situmorang	36
20.	Novi Dwiantoro	44
21.	Noviasari Manalu	50
22.	Nurul Setiawati	72
23.	Raden Lucky Okdiwianto	66
24.	Rahmad jempa	40
25.	Rayyan	60
26.	Reza Priatna	38
27.	Rezha Agassi	72
28.	Rita Wati	66
29.	Rizki Ramdani	58
30.	Satria Himawan	48
31.	Soraya	72
32.	Sri Arum Tunjungsari	68
33.	Suryadi	42
34.	Syifa Fauziah	56
35.	Uhung Muhamad Abdul Azis	52
36.	Yunandi Hijarmansyah	46
Rata-rata nilai		57.5

Kelas : XI IPS 3

No.	Nama Pesertadidik	Nilai
1.	Agil Ardi Putra	68
2.	Alvian Eka Cahaya	66
3.	Cahya Indra Prawira	68
4.	Dendy Surya Pratama	72
5.	Desti Nurul Martianti	70
6.	Devi Hardiana Bahar	46
7.	Dini Novaliana Sari	70
8.	Dora Wisnu Agung Sutejo	70
9.	Eka Saputra	66
10.	Eko Setiyo Julianto	66
11.	Endar Hambali	66
12.	Hilda Magdalena Sormin	70
13.	Intan Rahmawati	68
14.	Kartika Istani Dewi	64
15.	Khoerul Syayid	70
16.	Muchamad Lingga Hadi Pras	66
17.	Muhammad Ragil	60
18.	Muhammad Ramdan	68
19.	Mutiara Listiyani	68
20.	Nabilla Astri	64
21.	Nova Kristian	70
22.	Nova Tensa Uliana	68
23.	Novia Rista Sari Tarsono	84
24.	Nurhayati	60
25.	Nurul Aprilia Ayuningtiya	72
26.	Obed Stephanus Wira Saputra	68
27.	Priandhanto Putra Tama	54
28.	Puri Setyawati	60
29.	Ramos Gabriel	70
30.	Rani Astari	44
31.	Teas Febi	72
32.	Thesa Alfionita	68
33.	Verawati	68
34.	Vina Amelia Fardiani	62
35.	Zaki Rafsanjani	68
36.	Eben Heazer	64
Rata-rata nilai		66.05

ANEKDOTAL

Hari, Tanggal	Penelitian	Keterangan
Jumat 15 Februari 2008	Peneliti datang menyerahkan proposal dan surat ijin penelitian.	Kedatangan penulis diterima Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum yaitu Bapak Drs. Sutarli dan langsung bertemu dengan Kepala Sekolah yaitu Bapak Drs. Barita Pakpahan, MM. Dengan peneliti kepala sekolah sempat berbincang-bincang seputar kisi-kisi yang akan diberikan kepada pesertadidik kelas XI di SMA Negeri 93 Jakarta. Kepala Sekolah tidak berkeberatan dan mempersilahkan penulis untuk meneliti.
Senin 18 Februari 2008	Peneliti datang ke kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2.	Untuk memperkenalkan diri akan mengadakan penelitian di kelas tersebut.
Selasa 19 Februari 2008	Peneliti datang ke kelas XI IPS 1, XI IPS 2, dan XI IPS 3.	Untuk memperkenalkan diri akan mengadakan penelitian di kelas tersebut.
Senin 03 Maret 2008	Peneliti mendapatkan data-data sekolah yang diperlukan untuk di copy.	Data mengenai visi dan misi sekolah, jumlah seluruh pesertadidik dan data sejarah berdirinya SMA Negeri 93 Jakarta.
Senin 10 Maret 2008	Peneliti membagikan test kepada 142 pesertadidik.	Di ruang kelas XI IPA 1, XI IPS 2, XI IPS 2, dan XI IPS 3.
Selasa	Peneliti membagikan	Di ruang kelas XI IPA 2.

11 Maret 2008	test kepada 38 pesertadidik.	
Rabu 12 Maret 2008	Peneliti mewawancari 10 pesertadidik kelas XI.	Wawancara ini dilakukan secara acak di ruang perpustakaan.
Kamis 13 Maret 2008	Peneliti mewawancari 5 pesertadidik kelas XI.	Wawancara ini dilakukan secara acak di ruang perpustakaan.
Senin 24 Maret 2008	Peneliti melakukan wawancara dengan <i>Informan</i> yaitu guru bidang studi PKN kelas XI .	Wawancara dengan <i>Informan</i> yaitu Ibu. Dra. Nanti Triwardhani Utami di dilakukan di ruang guru.
Rabu 02 April 2008	Peneliti mengakhiri penelitian di sekolah.	Membuat surat keterangan penelitian.
Rabu 14 Mei 2008	Peneliti melakukan wawancara dengan <i>Expert Opinion</i> yaitu Dosen Hukum Tata Negara di UNJ.	Wawancara dengan <i>Expert Opinion</i> yaitu Bapak Prof. Ismail Arianto dilakukan di ruang Guru Besar FIS UNJ.



*Building
Future
Leaders*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926
PR IV : 4893982, BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180, Bag. UHTP : Telp. 4890046
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536

Nomor : 269/H39.12/PL/2008
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

11 Februari 2008

Yth. Kepala SMA Negeri 93
di Jakarta.

Kami mohon kesediaan Saudara, untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : Eka Sartika
Nomor Registrasi : 4115041830
Program Studi : PKn
Fakultas : Ilmu Sosial
Untuk mengadakan : Penelitian Untuk Penyusunan Skripsi

Di : SMA Negeri 93 Jakarta

Guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka Penulisan Skripsi Dengan Judul :
"Pemahaman Peserta Didik tentang Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 (Studi Deskriptif Peserta Didik Kelas XI SMA Negeri 93 Jakarta Timur)."

Atas perhatian dan bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Administrasi
Akademik dan Kemahasiswaan

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
2. Kaprog / Jurusan ISP



Dra. Desfrina
NIP. 131468219



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI (DIKMENTI)
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 93
Jl. Raya Bogor/Komp.Paspampres Kramatjati Telp.8402939, Faks.87796129
Jakarta Timur 13540

SURAT KETERANGAN

Nomor : 296 / 1.851.622

Kepala SMA Negeri 93 Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Eka Sartika**
Tempat, Tgl. Lahir : Jakarta, 12 April 1985
Nomor Registrasi : 4115041830
Fakultas : Ilmu Sosial
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : PPKn

adalah benar telah melaksanakan penelitian di SMA Negeri 93 Jakarta guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka Penulisan Skripsi Dengan Judul: "Pemahaman Peserta Didik Tentang Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 (Studi Deskriptif peserta didik Kelas XI SMA Negeri 93 Jakarta Timur)", yang dilaksanakan tanggal 15 Februari – 02 April 2008

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

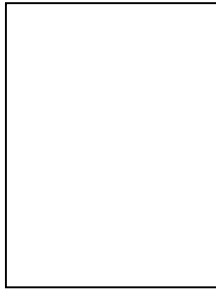


Jakarta, 02 April 2008

Kepala SMA Negeri 93 Jakarta

Drs. Barita Pakpahan, MM
NIP/NRK.130785498/159731

RIWAYAT HIDUP



Eka Sartika, lahir di Jakarta 12 April 1985. Saat ini tinggal bersama orangtua, di Jalan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Pintu II Bawah RT.03/013 No. 59 Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur 13560.

Menghabiskan Studi Dasar di SD Negeri Pinang Ranti 03

Petang. Studi Menengah Pertamanya di SLTP Negeri 49 Jakarta dan Studi Menengah Atas di SMA Negeri 93 Jakarta. Sejak tahun 2004 hingga sekarang masih berjuang untuk menyelesaikan studi di Universitas Negeri Jakarta Jurusan Ilmu Sosial Politik Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan.

Semasa di sekolah dasar pernah ikut dalam kegiatan perlombaan antar sekolah di lingkungan kelurahan Pinang Ranti, adapun perlombaan yang diadakan yaitu lomba Mengarang Bahasa Indonesia dan lomba CTP-4 Juara Harapan II antar sekolah. Di sekolah Menengah Pertama pernah aktif di ekskul Pramuka dan Pasukan Tata Bendera (Pastara), di sekolah Menengah Atas mengikuti ekskul Paduan Suara dan pernah mendapatkan Juara III dalam perlombaan Paduan Suara Antar SMA DKI yang dilaksanakan pada bulan Juni 2003.

Sementara itu, di bangku kuliah waktu luang di luar jam kuliah di isi dengan kegiatan kampus, seperti ikut dalam kepanitian dan menjadi Tim Pemantau Inpenden UN Tingkat SMP/MTs di tahun 2006 dan tingkat SMA/SMK di tahun 2008 serta kegiatan Karang Taruna di lingkungan sekitar rumah. Selama setahun pertama menjadi anggota Biro Akademik, ikut dalam kegiatan PKMJ-ODP Jurusan ISP sebagai peserta, dan ikut dalam Kepanitian MPA ISP 2005 sebagai seksi P3K, pernah menjadi pengurus HMJ ISP sebagai Ka. Biro Rumah Tangga Kesekretariatan dan Inventaris HMJ ISP FIS UNJ Periode 2006-2007. Alhamdulillah sejak semester tiga saya menerima beasiswa BBM di UNJ. Pernah mengikuti kegiatan Seminar Nasional & Silaturahmi Nasional Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Lokomotif Penanaman Nasionalisme yang diselenggarakan oleh HIMNAS PKN & HMJ ISP pada tanggal 03 November 2007.